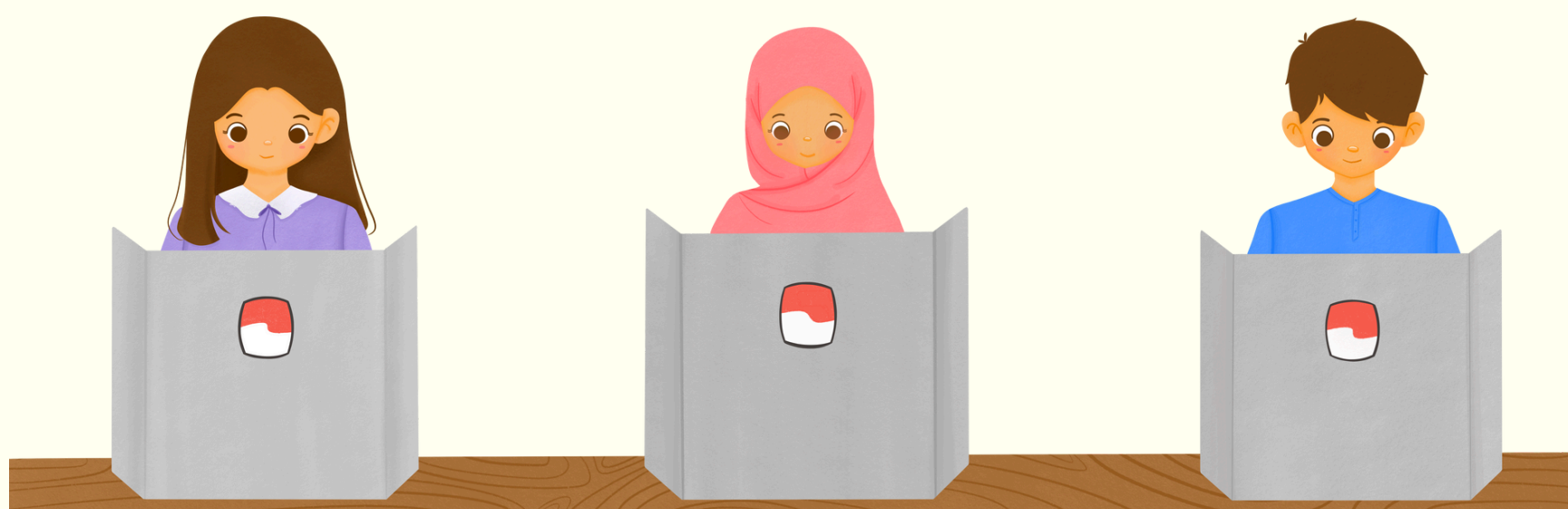


Pilkada Melalui DPRD

**HAK PILIH WARGA NEGARA MAU
DIRENGGUT JUGA?**



“Pilkada secara langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi.”

Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan

**Jika sama-sama konstitusional,
gimana hak pilih rakyat?**

Wacana dikembalikannya mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung, yaitu melalui DPRD, kembali muncul dalam diskusi perpolitikan Indonesia. Banyak pihak, termasuk partai politik dan pelaku usaha, menyetujui wacana tersebut.

Namun, mekanisme pilkada tidak langsung dikhawatirkan akan memukul mundur demokrasi lokal dan merenggut partisipasi publik.

Lantas, bagaimana penjelasannya?

Penolakan Pilkada Tidak Langsung Pernah Terjadi Sebelumnya

Wacana pilkada melalui DPRD juga pernah muncul pada 2014 lalu. Saat itu sidang paripurna DPR RI telah mengesahkan UU Pemilihan Kepala Daerah dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD.

Hal ini mendapat penolakan keras dari masyarakat karena dianggap mencederai demokrasi. Pada akhirnya, tekanan publik berhasil membuat Presiden SBY mengeluarkan PERPPU yang mengembalikan pilkada langsung.



VOA
Protes UU Pilkada, Warga Jakarta Kumpulkan KTP untuk Ajukan Gugatan ke MK

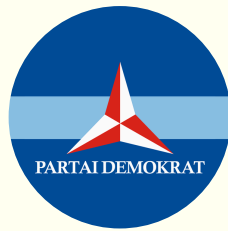


Aksi para netizen di Jakarta dan sekitarnya atas lahirnya UU Pilkada berinsung di Bundaran HI Jakarta Minggu 28 September. (VOA/Andyala)



Posisi Partai Politik di DPR RI

Dari delapan partai politik yang ada di DPR RI, sebanyak enam partai mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD.



PKS masih belum menentukan sikap terhadap wacana pilkada melalui DPRD



PDI Perjuangan menyatakan menolak pelaksanaan pilkada melalui DPRD



Apa Kata Pihak Pendukung Pilkada Tidak Langsung?

Mengurangi praktik politik uang, korupsi, dan beban finansial kampanye

DPRD diposisikan sebagai representasi rakyat dalam menentukan kepala daerah

Lebih efisien secara anggaran

Mengurangi biaya besar penyelenggaraan Pilkada langsung dan beban APBD

Masyarakat Pragmatis dalam Pilkada langsung

Hak pilih warga tidak digunakan dengan baik dan rentan politik uang

Memudahkan pemerintahan daerah

Menyederhanakan proses politik dan pembentukan pemerintahan daerah

**Lantas, apakah Pilkada tidak langsung
menjadi solusi?**

Pilkada Melalui DPRD bukanlah solusi

Pengalaman masa Orde Baru dan awal Era Reformasi, pemilihan tidak langsung melalui DPRD **tidak serta merta menghilangkan praktik politik uang**. Praktik transaksional justru bergeser dari ruang publik ke ruang tertutup elit pemerintahan dan legislatif daerah, sehingga menyulitkan pengawasan publik.



Praktik politik uang nyatanya tetap hadir di ruang tertutup. Terdapat kandidat yang mengeluarkan biaya hingga milyaran rupiah dalam pilkada melalui DPRD. (Kompas).

Selain itu, pertimbangan besar-kecilnya biaya penyelenggaraan pilkada, tidak boleh mengorbankan hak pilih rakyat.

Pilkada tidak langsung merenggut hak pilih rakyat

Argumen “melaksanakan pilkada tidak langsung atas dasar efisiensi biaya dan pragmatisme rakyat” merupakan upaya memukul mundur kedaulatan warga negara Indonesia. Ini juga mencerminkan, betapa elit meremehkan kapasitas politik rakyat.

Di tengah banyaknya permasalahan negara ini, masa hak pilih rakyat akan direnggut juga?

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 77,3% responden menyatakan memilih pilkada langsung dibandingkan dengan pilkada melalui DPRD. **Hal ini menunjukkan publik masih menginginkan mekanisme Pilkada dilakukan secara langsung.**



Menjamin hak pilih dan kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang harus dipertahankan. **Jangan sampai hak pilih rakyat dikorbankan atas alasan memudahkan proses pemerintahan daerah.** Untuk itu, wacana pilkada tidak langsung harus terus kita tolak.

Referensi

Akbar, Nawir. “Litbang Kompas: 89,5% Persen Gen Z Ingin Sistem Pilkada Langsung”, Kompas (14 Januari 2026) <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/14/09393701/litbang-kompas-895-persen-gen-z-ingin-sistem-pilkada-langsung>

Basyari, Iqbal. “Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih oleh DPRD”, Kompas.Id (13 Januari 2026) <https://www.kompas.id/artikel/jejak-politik-uang-saat-kepala-daerah-masih-dipilih-oleh-dprd>

BBC News Indonesia, “Penolakan Pilkada oleh DPRD Bergulir” (12 September 2014) https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140912_pilkada

Kumalasanti, Susana dan Basyari, Iqbal. “Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih oleh DPRD”, Kompas.Id (12 Januari 2026) <https://www.kompas.id/artikel/sabda-mk-yang-mengunci-pilkada-langsung>

Mulya, Fath. “Yusril: Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional”, antaranews.com (9 Januari 2026) <https://www.antaranews.com/berita/5342565/yusril-pilkada-langsung-maupun-lewat-dprd-sama-sama-konstitusional>

Press Release LBH Jakarta. “Lima Alasan Menolak Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD” (29 September 2014) <https://bantuanhukum.or.id/lima-alasan-menolak-pemilihan-kepala-daerah-melalui-dprd/>

Wahyu, Yohan. “Gen Z Menolak Pilkada DPRD”, Kompas.Id (14 Januari 2026) <https://www.kompas.id/artikel/gen-z-menolak-pilkada-dprd>

Sumber Foto

Antara Foto

VoA Indonesia

Kompas.Id